



Melsy

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Alamat : Pasar Baru Pangkalan – Telp. (0752) 55002

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PPTK, PEMBANTU BENDAHARA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dibidang Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu untuk penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPTK, Pembantu Bendahara dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
 NOMOR 01 TAHUN 2019
 TANGGAL 02 JANUARI 2019
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PPTK, PEMBANTU
 BENDAHARA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
 PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUDIRMAN NIP. 19680219 199001 1 001	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPTK	
2.	MELSY OKTANOVA, A.Md NIP. 19801020 200604 2 008	KASUBAG KEUANGAN, PELAPORAN DAN EVALUASI	PPK	
3.	SUPARNI NIP. 19611130 198101 2 001	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan sosial, Raskin dan kesejahteraan sosial lainnya 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
4.	M. NASIR, S.Pd NIP. 19660101 200003 1 008	KASI PELAYANAN	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 3. Penyelenggaraan PATEN
5.	ANTARDI PUTRA, A.Md NIP. 19661004 198903 1 004	KASI PEMERINTAHAN	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Bimbingan supervisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik 2. Bimbingan supervisi dan pengawasan Dana Nagari 3. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa
6.	SULMARNI NIP. 19830310 201001 2 022	STAF	PEMBANTU BENDAHARA	
7.	IGEMMESTI NIP. 19741015 200604 2 010	STAF	PPHP	

Ditetapkan di Pangkalan
 Pada tanggal 02 Januari 2019

